



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PENUTUPAN MASA PERSIDANGAN IV
TAHUN SIDANG 2023-2024**

KAMIS, 4 APRIL 2024

*Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh,
Salam Sejahtera bagi kita semua,
Om Swasti Astu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan,*

Yang kami hormati:

- **Para Wakil Ketua DPR RI;**
- **Para Anggota DPR RI;**
- **Hadirin sekalian yang berbahagia.**

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga kita dapat hadir dalam Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024.

Atas nama pimpinan DPR RI dan segenap Anggota DPR RI, menyampaikan rasa simpati yang mendalam untuk para korban yang terdampak akibat bencana gempa di beberapa wilayah di Jawa Timur dan para korban bencana banjir yang terjadi di beberapa wilayah di tanah air. Pemerintah dan para pemangku kepentingan harus selalu siaga dan memitigasi dampak bencana alam akibat cuaca ekstrem.

Sidang Dewan yang terhormat,

Saat ini, kita menghadapi resiko perlambatan ekonomi akibat perlambatan ekonomi global. Selain tantangan global tersebut, Indonesia juga menghadapi tantangan domestik, antara lain: dinamika konsolidasi politik pasca pemilu 2024, kenaikan harga komoditas kebutuhan rakyat, nilai tukar rupiah yang berpotensi melemah terhadap US dollar yang dapat menyebabkan biaya produksi barang tertentu meningkat.

Dampak langsung dari kondisi ekonomi tersebut bagi rakyat adalah kenaikan harga barang kebutuhan pokok, daya beli yang menurun, dan menurunnya derajat kesejahteraan rakyat.

DPR RI memberikan perhatian yang besar atas kondisi ekonomi rakyat saat ini, melalui fungsi-fungsi konstitusional DPR RI mendorong pemerintah untuk dapat menjaga stabilitas ekonomi dengan menjaga inflasi tetap rendah; memperkuat pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada faktor-faktor domestik; melindungi daya beli masyarakat

miskin dan rentan; serta pemerintah harus mempercepat reformasi struktural yang dapat memperkuat perekonomian nasional.

Dalam jangka pendek, pemerintah harus dapat memastikan harga kebutuhan pokok yang terjangkau, daya beli masyarakat yang tetap kuat, sehingga rakyat Indonesia dalam merayakan lebaran dapat merayakannya dengan penuh kegembiraan.

Sidang Dewan yang terhormat,

Tahapan pemilu pemungutan dan perhitungan suara telah selesai dilaksanakan; dan saat ini tahapan pemilu memasuki tahapan Penanganan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan perundang-undangan.

Indonesia adalah negara hukum. Komitmen ini dibangun atas dasar kesadaran akan pentingnya nilai-nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pemilu sebagai alat mewujudkan demokrasi, juga diamanatkan oleh konstitusi agar dapat diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Setiap peserta pemilu, dituntut memiliki kesadaran nilai berdemokrasi untuk juga berkomitmen melaksanakan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Penanganan Perselisihan Hasil Pemilu yang sedang berlangsung saat ini di Mahkamah Konstitusi, hendaknya menjadi jalan dalam menyempurnakan demokrasi di Indonesia dan memperteguh komitmen aparatur negara, partai politik, dan penyelenggara pemilu untuk menjadikan Pemilu yang bermartabat sesuai amanat konstitusi.

Sidang Dewan yang terhormat,

DPR RI telah melanjutkan pembahasan terhadap 18 (*delapan belas*) Rancangan Undang-Undang (RUU) yang saat ini masih berada dalam Pembicaraan Tingkat I.

Dalam pelaksanaan fungsi legislasi ini, DPR RI bersama dengan Pemerintah telah menyetujui 2 (*dua*) RUU untuk

menjadi Undang-Undang (UU) dan menetapkan 27 (*dua puluh tujuh*) RUU menjadi RUU Usul Inisiatif DPR RI.

DPR RI juga melalui Alat Kelengkapan Dewan telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan APBN Tahun 2023 sekaligus memantau pelaksanaan APBN Tahun 2024 yang telah berjalan selama satu triwulan.

DPR RI akan terus mencermati realisasi program dan kegiatan Tahun Anggaran 2024 dapat terlaksana dengan baik, dan mengedepankan aspek transparansi, akuntabilitas, serta kebermanfaatan bagi rakyat.

Terkait anggaran tahun depan, DPR RI telah menyetujui Rancangan Jadwal Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2025.

Sidang Dewan yang terhormat,

DPR RI melalui Alat Kelengkapan Dewan, telah melaksanakan fungsi pengawasan melalui berbagai rapat

yang terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh rakyat, antara lain :

1. Kenaikan harga bahan makanan pokok dan memastikan ketersediaan serta distribusi pangan tetap terjaga selama bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1445 H;
2. Mitigasi Risiko terhadap kenaikan dan kelangkaan harga bahan pangan;
3. Pengamanan stok BBM selama Ramadan dan menjelang Mudik Lebaran 2024;
4. Kesiapan Pemerintah dalam menghadapi arus mudik dan arus balik serta memastikan seluruh rangkaian momen Lebaran 2024 berjalan aman dan terkendali;
5. Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2024; dan
6. Penanganan kasus demam berdarah dan upaya pencegahan serta pengendalian penularannya agar dilakukan secara integratif.

Selama Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 ini, DPR RI juga telah melaksanakan *fit and proper test* terhadap :

- a. Calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Masa Jabatan 2024-2029; dan
- b. Calon Kantor Akuntan Publik (KAP) Pemeriksa Laporan Keuangan BPK RI Tahun 2023.

DPR RI telah menyelesaikan proses pembahasan dalam pemberian pertimbangan terhadap Calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Negara Sahabat untuk Indonesia.

Sidang Dewan yang terhormat,

DPR RI ikut menghadiri berbagai konferensi untuk menguatkan peran parlemen di kancah global. Konferensi tersebut antara lain, *Women Speakers' Summit* di Paris, Konferensi ke-18 Parlemen Negara OKI (PUIC) di Pantai Gading dan Sidang Umum ke-148 IPU di Geneva pada tanggal 23-27 Maret 2024.

Dalam konferensi PUIC tersebut, Indonesia ditetapkan sebagai Presiden PUIC sekaligus menjadi tuan rumah Konferensi ke-19 PUIC pada tahun 2025. Hal ini tentu akan

menjadi peluang bagi Indonesia untuk berkontribusi secara lebih bermakna bagi perdamaian serta kesejahteraan dunia.

Tahun ini DPR RI juga akan menyelenggarakan *the 10th World Water Forum* pada tanggal 19-22 Mei 2024 di Nusa Dua, Bali dan *Indonesia Pacific Parliamentary Partnership (IPPP)* pada bulan Agustus 2024 di Jakarta.

Selain kegiatan multilateral, DPR RI juga melakukan pertemuan bilateral melalui penerimaan kunjungan duta besar dan parlemen negara sahabat, antara lain Bosnia-Herzegovina, Uni Eropa, Kanada, Belarusia, Turki, dan Mesir.

DPR RI, melalui fungsi diplomasi tersebut, akan berperan dalam mendorong hubungan kerjasama yang baik antar parlemen dan ikut memperkuat posisi diplomasi politik luar negeri Republik Indonesia.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Pada masa reses ini, kita akan bersama-sama dengan rakyat untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri.

Marilah kita menyapa rakyat, pada bulan yang penuh rahmat ini, memperkuat silaturahmi, mempersatukan rakyat dalam semangat gotong royong untuk Indonesia.

Ijinkan saya membacakan pantun:

Putih-putih bunga melati (cakep)

Harum semerbak menghiasi taman (cakep)

Mari bergembira di dalam hati

Menyambut bulan penuh ampunan.

Jalan-jalan ke kota Medan (cakep)

Malam harinya melihat bulan (cakep)

Hati senang bertemu Ramadhan

Mari kita bermaaf-maafan.

Atas nama Pimpinan DPR RI, saya mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia, mulai tanggal 5 April sampai dengan tanggal 13 Mei 2024, DPR RI memasuki Masa Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024.

Selamat memasuki masa reses dan menyapa rakyat. Saya juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa dan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan rahmat dan bimbingan-Nya bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Om shanti shanti shanti om.

**KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,**

Ttd.

Dr. (H.C.) PUAN MAHARANI

Lampiran:

➤ Daftar RUU yang masih berada dalam Pembahasan Tingkat I:

1. RUU tentang Daerah Kepulauan;
2. RUU tentang Hukum Acara Perdata;
3. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. RUU tentang Pengesahan International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (Konvensi Internasional untuk Pelindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa);
5. RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan;
6. RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
7. RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India mengenai Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of India Concerning Cooperation in the Field of Defence);

8. RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
9. RUU tentang Desain Industri;
10. RUU tentang Bahasa Daerah;
11. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;
12. RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Accord entre le Gouvernement de la République D'Indonésie et le Gouvernement de la République Française relatif a la Coopération dans le Domaine de la Défence);
13. RUU tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of

Defence of the United Arab Emirates on Cooperation in the Field of Defence);

14. RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Agreement between the Government of Republic of Indonesia and the Royal Government of the Kingdom of Cambodia Concerning Cooperation in the Field of Defence);
15. RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federatif Brasil tentang Kerja Sama Terkait Pertahanan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federative Republic of Brazil on Cooperation in Defence Related Matters);
16. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Paten; dan

➤ **Calon anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Masa Jabatan 2024-2029:**

1. (Dr. iur). Antonius P.S. Wibowo, S.H., M.H.;

2. Sri Suparyati, S.H., LL.M.;
3. Susilaningtias, S.H., M.H.;
4. Wawan Fahrudin, S.Sos., M.E.;
5. Mahyudin, S.H., M.H.;
6. Brig. Pol. (Purn) Dr. Achmadi, S.H., M.A.P; dan
7. Sri Nurherwati, S.H.

➤ **Nama Kantor Akuntan Publik (KAP) Pemeriksa Laporan Keuangan BPK RI Tahun 2023:**

KAP Drs. Kartoyo dan Rekan

➤ **Kegiatan Diplomasi Parlemen:**

1. Konferensi Parliamentary Union of OIC Countries atau Konferensi ke-18 Parlemen OKI di Pantai Gading (2-5 Maret 2024);
2. Webinar Inter-Parliamentary Union (IPU) on Climate and the Environment (4 Maret 2024); dan
3. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ketua Parlemen Perempuan Dunia atau Women Speakers' Summit 2024 di Paris, Perancis (6-7 Maret 2024).